



Pembangunan Enam Kantor Kelurahan Jadi Atensi Dewan

Pembangunan Enam Kantor Kelurahan Jadi Atensi Dewan

■ Anggarkan Rp11,4 Miliar di APBD 2025



KESES PERTA
MASA PERSIDANGAN PERTAMA TAHUN SIDANG DAPIL III (KECAKUPAN BIRINGKANAYA & TAMBAHAN) KOTA MAKASSAR
SENIN, 2 DESEMBER 2024
JL. PARUMPA RT. 001/ RW. 1 KEL. DAYA KEMAS

Satu kantor kelurahan itu sudah dianggarkan Rp1.9 Miliar. Kelurahan adalah ujung tombak pemerintahan di tingkat paling bawah, tempat masyarakat langsung mengakses berbagai layanan. Jika fasilitasnya tidak memadai, tentu pelayanan akan terhambat.

Yani warga, terutama saat volume pengurusan dokumen administratif meningkat. Selain itu, ada kelurahan yang bahkan tidak memiliki fasilitas dasar seperti ruang arsip, ruang tunggu yang memadai, dan perangkat teknologi pendukung.

"Kami sering menerima keluhan dari masyarakat yang kesulitan mengakses layanan. Misalnya, saat mengurus dokumen kependudukan atau izin tertentu, mereka harus antri di ruangan sempit dengan fasilitas yang minim. Ini tentu tidak ideal, terutama di daerah dengan jumlah penduduk yang terus bertambah," jelas Anggota Komisi A DPRD Makassar, Idris.

Selain aspek pembangunan fisik, DPRD juga mengusulkan integrasi teknologi informasi dalam desain kantor kelurahan yang baru. Dengan anggaran yang memadai, DPRD berencana melengkapi setiap kantor kelurahan dengan perangkat digital untuk mendukung layanan berbasis online.

Tujuannya adalah untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan tanpa harus datang langsung ke kantor.

DPRD juga berkomitmen untuk mengawal implementasi pembangunan kantor kelurahan ini hingga selesai. "Kami juga berencana melakukan pengawasan ketat agar proses pembangunan berjalan sesuai rencana dan tidak menemui hambatan," ucapnya.

Dengan terealisasinya pembangunan kantor kelurahan pada tahun anggaran 2025, DPRD optimis bahwa pelayanan kepada masyarakat akan semakin maksimal. (Hir)

Anggota Komisi A DPRD Makassar, Dr. Tri Zulkarnain Ahmad

MAKASSAR, UPEKS—Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar terus mendorong percepatan pembangunan kantor kelurahan yang layak di enam wilayah di Kota Makassar.

Usulan ini telah menjadi salah satu agenda prioritas dalam rencana anggaran tahun 2025, mengingat pentingnya fasilitas pemerintahan yang memadai untuk mendukung kelancaran pelayanan publik.

Anggota Komisi A DPRD Makassar, Dr. Tri Zulkarnain Ahmad, menyatakan bahwa pembangunan kantor kelurahan merupakan kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditunda lagi.

Oleh karena itu, dalam APBD Pokok 2025 telah dianggarkan sebesar Rp 1,9 miliar untuk masing-masing kelurahan, sehingga total anggaran yang di siapkan mencapai Rp 11,4 miliar.

"Hasil monitoring kami bersama camat beberapa waktu lalu, itu persoalan kantor kecamatan Kelurahan Tello Baru

yang bisa diambil alih dan sudah dime nangkan kan di pengadil. Inilah kami katakan jangan bicara soal kinerja atau semacamnya kalau kantornya saja tidak ada," ungkapnya.

Apalagi, banyak kelurahan saat ini masih beroperasi di gedung sementara atau fasilitas yang kurang layak, sehingga berdampak pada kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Jadi kita paksakan harus tahun 2025 ini sudah terbangun kantor lurah, dari seluruhnya ada 6 kantor lurah. Karena saya dapil 3 saya khususkan kantor kelurahan berua," bebernya.

"Satu kantor kelurahan itu sudah dianggarkan Rp1.9 Miliar. Kelurahan adalah ujung